



BUDAYA, GENDER, DAN KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI JAWA BARAT

Yulianingsih^{1*}, Erna Herawati²

^{1,2} Department of Anthropology, FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung, West Java.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 28th November, 2021
 Review : 23th March, 2022
 Accepted : 18th April, 2022
 Published : 05th June, 2022
 Available Online : June 2022.

KEYWORDS

Violence against women; gender; gender inequality; culture; Sundanese.

CORRESPONDENCE

* E-mail: yulianingsih2121@gmail.com

ABSTRACT

People in West Java uphold harmony and peace as an important part of their worldview. Yet, violence against women continues to occur, including in rural areas. This qualitative research using a case study design was conducted to explore and describe the cases of violence against women and the factors contributing to the case in Desa Selaras, a small village in rural West Java. The data were collected through observation and in-depth interviews with female violence survivors and NGO activists who assist them; as well as archival and literature studies. The findings of this research suggest the various types of violence against women, such as psychological violence (polygamy), physical violence (persecution), economic violence (economic exploitation and financial neglect), and sexual violence. Among the factors contributing to the violence in the village were gender inequality, financial problems, lack of knowledge and passive attitudes towards violence among the survivors, cultural values about women, lack of communication in the family, and male personality.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan pada perempuan adalah tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan bagi perempuan. Kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, bahkan ekonomi (Purba, 2011; Nurdjunaida, 2006 dalam Purnaningsih *et al.*, 2014). Penyebab kekerasan pada perempuan secara umum, menurut beberapa penelitian, antara lain budaya patriarki (Dafeni *et al.*, 2017; Obie, 2018; You, 2019), dan faktor ekonomi (Dafeni *et al.*, 2017; Obie, 2018; Sujadmi, 2017). Faktor lain yang juga menjadi penyebabnya adalah budaya mengonsumsi minuman keras dan poligami (Obie, 2018), dan pernikahan dini (yang menyebabkan pasangan suami dan istri berada dalam kondisi mental dan ekonomi yang belum stabil dalam menjalankan rumah tangga) (Dafeni *et al.*, 2017; Sujadmi, 2017).

Di Provinsi Jawa Barat, jumlah kasus kekerasan pada perempuan cukup tinggi. Bahkan, pada 2019, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan lembaga pengada layanan mencatat jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Jawa Barat

mencapai 2.738 kasus. Jumlah ini menyumbang 18% dari seluruh jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020).

Fenomena kekerasan pada perempuan di Jawa Barat menarik untuk ditelusuri karena bertolak belakang dengan falsafah hidup etnis Sunda, etnis mayoritas di Jawa Barat, yang sangat menjunjung tinggi harmoni dan kesetaraan gender. Di Sunda, masyarakat memiliki falsafah hidup Sunda yang sangat populer, yaitu Tri Silas: "*Silih asih, silih asah, silih asuh*". Bagi orang Sunda sikap saling menyayangi (*silih asih*), saling berbagi ilmu pengetahuan (*silih asah*) dan saling membimbing berlandaskan keharmonisan (*silih asuh*) merupakan tuntunan utama (Rosala, *et al.*, 2021). Konsep Tri Silas ini mewujudkan dalam aneka aspek kehidupan. Salah satunya dalam gerakan sosial kemasyarakatan di Kota Bandung yang bertujuan membantu orang dengan HIV dan AIDS yaitu Warga Peduli AIDS. Tri Silas menjadi prinsip yang mendorong para kader kesehatan untuk menolong dan mendampingi para

tetangga mereka yang sakit dan memerlukan pertolongan kesehatan, finansial, dan emosional (Herawati, 2019).

Di dalam konteks gender, etnis Sunda mengenal dan melestarikan tradisi kesetaraan pada hak akses bagi anak laki-laki dan perempuan terhadap harta keluarga (berupa tanah) atau warisan (Mugniesyah dan Kosuke, 2007). Di dalam konteks religi, lelaki dan perempuan juga memiliki kesetaraan dalam hal kontribusi pelaksanaan upacara tradisi dan kegiatan sehari-hari (Rohmana, 2014; Muttaqien, 2020).

Data jumlah kekerasan pada perempuan yang disajikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan, menunjukkan sisi lain dari kehidupan masyarakat pedesaan di Jawa Barat yang secara umum dikenal harmonis. Penelitian ini berupaya menggambarkan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh para perempuan di pedesaan dengan menampilkan kasus Desa Selaras (pseudonym), sebuah desa agraris di Jawa Barat. Penelitian ini juga memaparkan faktor-faktor yang turut berperan menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut dan kaitannya dengan nilai-nilai budaya setempat terutama gender dan patriarki.

Penelitian mengenai kekerasan pada perempuan dan kaitannya dengan budaya pernah dilakukan oleh Obie (2018) di masyarakat Muna, Kim dan Yang (2016) di Korea, dan Tanaya (2021) di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara. Penelitian Obie (2018) menemukan bahwa akar dari kekerasan pada perempuan yang kerap terjadi di masyarakat Muna disebabkan oleh budaya patriarki yang sangat kuat. Selain itu, budaya mengonsumsi minuman keras di kalangan laki-laki Muna juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan.

Penelitian Kim dan Yang (2016) di Korea menemukan bahwa dalam kebudayaan setempat, perempuan terikat oleh nilai tradisional Konfusianisme yang bernama *sam-jong-jie-do*, yang berarti bahwa perempuan harus mematuhi tiga kelompok laki-laki di dalam keluarganya, yaitu ayah, suami, dan anak laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan di Korea Selatan tidak dapat meninggalkan rumah mereka dan mencari pertolongan ketika mereka menjadi korban kekerasan.

Penelitian Tanaya (2021) di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara juga menemukan bahwa faktor budaya berkontribusi terhadap kekerasan pada perempuan. Penyebab kekerasan pada perempuan di Nusa Tenggara Timur salah satunya adalah pergeseran makna tradisi Belis yang menyebabkan laki-laki dianggap memiliki kuasa terhadap perempuan setelah mereka menikah. Pada masyarakat di Sumatera Utara, perempuan kerap kali mendapat kekerasan ekonomi karena norma sosial yang melanggengkan dikotomi peran publik untuk laki-laki dan peran domestik untuk perempuan.

Penelitian Obie (2018), Kim dan Yang (2016), dan Tanaya (2021) dilakukan di latar kebudayaan yang berbeda tetapi menemukan hal yang serupa, yaitu bahwa faktor budaya berperan besar dalam

terjadinya kasus kekerasan pada perempuan. Bentuk budaya yang menjadi faktor kekerasan pada perempuan berbeda-beda, sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masing-masing daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kekerasan pada perempuan di Jawa Barat dan faktor penyebabnya, terutama kaitan antara faktor budaya dengan kekerasan yang terjadi. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena adanya paradoks antara falsafah hidup masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi harmoni dengan jumlah kekerasan yang tinggi di Jawa Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan perempuan penyintas kekerasan dan aktivis NGO yang mendampingi. Studi pustaka juga dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Nama lokasi penelitian, Desa Selaras, dan nama informan disajikan dalam pseudonym.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Informan yang berhasil Diwawancarai

Informan	Kriteria Informan	Jumlah Informan
Penyintas kekerasan di Desa Selaras	Warga Desa Selaras yang pernah mengalami kekerasan	2 orang
Aktivis NGO pendamping kekerasan dan pemberdayaan perempuan	Warga Desa Selaras yang menjadi aktivis NGO pemberdayaan perempuan yang memiliki pengetahuan tentang isu gender dan aktif mendampingi kasus kekerasan yang terjadi di Desa Selaras	5 orang

Data dianalisis dengan mengikuti prinsip analisis data kualitatif. Wawancara ditranskrip, diberi kode dan dikelompokkan berdasarkan tema. Kelompok-kelompok tema menjadi bahan interpretasi (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014). Metode analisis gender model Harvard (Puspitawati, 2013; Van Bemmelen, 2009) juga dilakukan untuk memetakan pembagian peran gender di lokasi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gender dalam Budaya Sunda

Gender adalah konstruksi sosial budaya mengenai karakter laki-laki dan perempuan (Kottak, 2000). Gender menentukan peran sosial perempuan dan laki-laki di masyarakat. Di Sunda, kedudukan perempuan dan laki-laki setara di dalam beberapa hal. Salah satunya dalam pelaksanaan tradisi, upacara adat, ritual, dan kegiatan sehari-hari. Pada ritual *mapag* Dewi Sri di komunitas adat Banceuy, Kabupaten Subang misalnya, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan keterlibatan yang seimbang. Perempuan memiliki peran yang penting dalam ritual dan mendapat penghormatan tinggi dalam prosesi ritual (Rohmana, 2014). Porsi keterlibatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ritual juga terdapat di masyarakat Baduy; yaitu dalam pelaksanaan upacara keagamaan Sunda Wiwitan. Selain itu, laki-laki dan perempuan di Baduy juga saling membantu dan mendukung pada kegiatan sehari-hari (Muttaqien, 2020).

Di sisi lain, terdapat pula ketimpangan gender di Sunda. Hal ini tampak dalam stereotipe tentang perempuan dan justru berkembang lebih pesat melebihi praktik kesetaraan. Konsep perempuan ideal di masyarakat Sunda tidak terlepas dari sudut pandang laki-laki yang menginginkan sosok perempuan yang dapat merawat diri, mampu menyenangkan suami, dan penurut terhadap suami. Hal ini tampak dalam peribahasa yang menggambarkan relasi laki-laki dan perempuan, antara lain "*bojo denok sawah ledok*" (hidup senang karena istri yang menawan dan harta yang cukup); "*ngeunah angeun, ngeunah angen*" (hidup dengan makan yang berkecukupan dan istri yang menyenangkan suami); dan "*sapi nurut ka banteng*" (istri yang mengikuti perkataan suami) (Zulaikha dan Purwaningsih, 2019).

Stereotipe gender juga tampak dalam pendapat masyarakat bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin dan perempuan berperan sebagai pihak yang dipimpin. Hal ini tampak dalam peribahasa *awewe dulang tinande*¹. Peribahasa ini menggambarkan konsep bahwa perempuan harus mengikuti kemauan dan arahan laki-laki atau suami.

2. Peran Gender dan Pembagian Kerja di Desa Selaras

Desa Selaras adalah desa agraris yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Penduduk desa ini berjumlah 16.670 jiwa dengan komposisi 52% laki-laki dan 48% perempuan. Mayoritas penduduk desa ini (63%) berada pada kategori usia produktif yaitu 15-64 tahun, tetapi 30% di antaranya tidak memiliki pekerjaan.

Jenis mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk Desa Selaras sebagian besar berupa pekerjaan di sektor informal seperti pedagang, buruh harian lepas, petani, dan buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000 hingga Rp. 100.000 per hari. Penduduk yang bekerja sebagai pedagang pada umumnya berdagang dengan membuka warung di depan rumah mereka atau berjualan keliling di sekitar desa hingga ke luar kota. Pada umumnya, pedagang yang membuka warung di depan rumah adalah perempuan. Mereka biasanya berjualan sambil menjaga anak; sedangkan pedagang yang berkeliling hingga ke luar kota pada umumnya adalah laki-laki. Mereka biasa berjualan keliling dari pagi hingga sore hari; sebagian berjualan keliling selama beberapa bulan di luar kota. Hal ini menyebabkan adanya peran laki-laki dalam rumah tangga yang diambil alih oleh perempuan selama laki-laki tersebut pergi mencari nafkah.

Perbedaan peran gender antara perempuan dan laki-laki terlihat dalam perbedaan peran produktif (ekonomi), peran reproduktif (kegiatan rumah tangga), dan peran sosial (di masyarakat) (Puspitawati, 2013). Di Desa Selaras, perbedaan peran produktif, laki-laki dan perempuan terlihat dalam perbedaan jenis dan karakteristik pekerjaan yang dikerjakan. Pada umumnya, laki-laki berkesempatan mengakses pekerjaan yang lebih beragam dengan jangkauan wilayah yang lebih luas dibandingkan perempuan. Akibatnya, perempuan cenderung bekerja di sekitar rumah agar mereka tetap dapat menjalankan peran reproduktif mereka.

Perbedaan peran produktif antara laki-laki dan perempuan tampak di beberapa sektor, yaitu sektor perdagangan, jasa, manufaktur, dan pertanian. Di sektor perdagangan, laki-laki pedagang cenderung memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dibandingkan perempuan pedagang. Pedagang laki-laki tidak hanya berjualan di dekat rumah saja, tetapi berkeliling desa dan bahkan keliling ke beberapa kecamatan dan ke luar kota. Pedagang perempuan hanya berjualan di warung depan rumah atau sebatas berkeliling di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini karena mereka harus menjalankan multi peran, yaitu peran produktif sekaligus reproduktif, misalnya menjaga anak sambil bekerja (lihat gambar 1). Multi peran yang dimiliki oleh perempuan bukanlah hal yang baru. Fenomena perempuan yang mengemban multi peran di ranah domestik dan publik tercermin dalam penelitian Korlefura dan Tupamahu (2021) mengenai multi perempuan pedagang di pasar tradisional, penelitian Jalil dan Tanjung (2020) tentang multi perempuan di masyarakat petani, dan penelitian Rostiyati (2018) tentang multi perempuan di kalangan masyarakat nelayan.

¹ Secara harfiah, *awewe dulang tinande* berarti 'si perempuan nampan'; *awewe* = perempuan, *dulang tinande* = nampan kayu besar



Gambar 1. Potret multi peran perempuan di Desa Selaras: menjaga warung dan mengasuh anak

Pada pekerjaan di sektor jasa dan manufaktur, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tampak jelas. Laki-laki pada umumnya melakukan pekerjaan yang menggunakan kekuatan fisik seperti menjadi supir kendaraan berat, buruh bangunan, dan montir di bengkel; sedangkan perempuan melakukan pekerjaan yang menggunakan keterampilan tangan seperti jasa rias pengantin, produksi makanan, dan keterampilan mengerjakan urusan domestik seperti asisten rumah tangga. Perbedaan peran produktif laki-laki dan perempuan pada sektor jasa dan manufaktur menunjukkan pembagian kerja berdasarkan gender, yaitu kategori pekerjaan yang sesuai bagi kelompok feminin dan maskulin yang dikonstruksi oleh masyarakat (Hubeis, 2010 dalam Sita dan Herawati, 2017). Kasus serupa tentang pembagian kerja berdasarkan gender dapat ditemui pada penelitian Vibriyanti (2015) tentang industri kerajinan gerabah di Desa Banyumulek, NTB. Mayoritas pengrajin gerabah di desa tersebut adalah perempuan, sehingga apabila ada laki-laki yang berpartisipasi dalam industri tersebut sebagai pengrajin, mereka dianggap sebagai laki-laki yang feminin.

Pada sektor pertanian, laki-laki cenderung melakukan pekerjaan yang mengharuskan ia mengeluarkan tenaga yang lebih besar dibandingkan perempuan. Perbedaan jenis pekerjaan antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan adanya perbedaan upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan perempuan yaitu sebesar Rp. 50.000; sedangkan perempuan mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000 dengan jam kerja yang sama yaitu dari pukul 07.00 hingga pukul 12.00. Praktik pemberian upah yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan ini merupakan fenomena umum yang masih sering dijumpai. Hasil analisis Iskandar dan Hamid (2019) tentang perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan di Indonesia menemukan bahwa praktik pemberian upah yang lebih rendah kepada perempuan terjadi di 31 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di bidang ekonomi masih secara umum terjadi di Indonesia.

Di dalam menjalankan fungsi reproduktif, laki-laki dan perempuan saling membantu, tetapi perempuan

lebih mendominasi. Hal ini karena pada sebagian rumah tangga, lelaki sering bepergian jauh, sehingga perempuan bertanggungjawab di rumah. Apabila suami ingin membantu pekerjaan rumah tangga, istri biasanya harus memberikan arahan kepada suami mereka karena para suami mereka tidak/kurang terampil. Pekerjaan reproduktif cenderung hanya dilakukan oleh orang tua. Anak-anak beranggapan bahwa pekerjaan reproduktif hanya dikerjakan oleh perempuan. Pada kasus ketika suami-istri bercerai, anak biasanya tinggal bersama ibu mereka, dan laki-laki jarang memberikan nafkah bagi anaknya setelah perceraian.

Perempuan di Desa Selaras memiliki peran yang lebih dominan dalam menjalankan kegiatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan, misal pengajian rutin dan gotong royong membantu masyarakat yang terkena musibah. Pada kegiatan pengajian, partisipasi perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini ditandai dengan jumlah peserta pengajian laki-laki yang selalu lebih sedikit dibandingkan perempuan.

Partisipasi laki-laki dan perempuan cenderung lebih seimbang pada kegiatan gotong royong dalam rangka membantu anggota masyarakat yang terkena musibah; misal, ketika ada warga yang meninggal dunia. Pada kegiatan ini laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing. Perempuan biasanya mengerjakan urusan domestik; sedangkan laki-laki berperan dalam mengurus pemakaman seperti menggali makam dan melakukan proses pemakaman. Perbedaan kegiatan oleh laki-laki dan perempuan dalam kegiatan gotong-royong ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kontribusi yang sama penting walaupun peran yang dijalankan berbeda, sehingga mereka sama-sama mampu membantu warga yang terkena musibah.

Perempuan cenderung tetap melakukan jenis-jenis pekerjaan yang identik dengan pekerjaan domestik meski mereka berada dalam setting publik, sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan non-domestik. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak berarti sebuah ketimpangan. Mereka menganggap bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi dan dianggap sama penting.

Pada umumnya, terkait akses dan kontrol terhadap sumber daya, perempuan memiliki akses yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Namun, akses tersebut tidak diimbangi dengan kontrol yang sama besar. Laki-laki justru menjadi pemilik kontrol terhadap sebagian besar sumber daya yang dapat diakses oleh perempuan. Pada aspek akses dan kontrol terhadap sumber daya, umumnya perempuan memiliki akses yang lebih besar dibandingkan laki-laki; akan tetapi, hal ini tidak seimbang dengan kontrol yang dimilikinya, karena kontrol terhadap sumber daya sebagian besar dimiliki oleh laki-laki.

Ketidakseimbangan akses dan kontrol antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dapat terlihat pada kegiatan mengatur keuangan keluarga. Perempuan adalah pengatur keuangan keluarga,

mereka bertanggung jawab mengatur penghasilan suami mereka agar cukup untuk kebutuhan keluarga. Tanggung jawab ini menyebabkan perempuan harus mencari solusi sendiri (tanpa melibatkan laki-laki) untuk memenuhi kebutuhan keluarga apabila penghasilan suami mereka tidak cukup; dengan cara menghemat pengeluaran keluarga atau mencari sumber keuangan lain untuk menutupi kekurangan tersebut.

Contoh lain ketidakseimbangan akses dan kontrol terhadap sumber daya terlihat dalam kegiatan pinjaman modal dari MBK (Mitra Bisnis Keluarga). Pihak yang dapat mengakses pinjaman ini adalah perempuan (istri) atas persetujuan laki-laki (suami). Pembayaran setoran cicilan pinjaman ini harus dilakukan oleh perempuan melalui perkumpulan rutin setiap minggu. Apabila perempuan yang meminjam uang kepada MBK tidak mengikuti perkumpulan ini, maka pihak MBK biasanya mengejar perempuan tersebut untuk membayar utang mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber dana dimiliki oleh perempuan dengan kontrol laki-laki. Akses tersebut menyebabkan perempuan menanggung risiko yang besar karena mereka harus bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Hal ini berarti bahwa akses tanpa kontrol yang dimiliki oleh perempuan terhadap sumber daya menyebabkan kesulitan bagi mereka. Ketidakseimbangan ini disebutkan dalam literatur berkaitan dengan relasi kuasa. Perempuan memang memiliki tanggung jawab dan kontribusi terhadap ekonomi keluarga; akan tetapi, kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan tidak dapat melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki (Sullivan, 1994 dikutip Dewi, 2017).

Ketimpangan kontrol oleh laki-laki dan perempuan juga terlihat pada keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan politik dan perumusan kebijakan. Pada kegiatan musyawarah desa, mayoritas pihak yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah laki-laki; sedangkan perempuan hanya diwakili oleh anggota PKK yang jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, perempuan di desa ini memiliki kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki untuk mengikuti kontestasi politik karena adanya stereotipe yang menyatakan perempuan kurang dapat diandalkan sebagai pemimpin karena memiliki sifat "*heureut lengkah*"². Stereotipe ini menyebabkan kurangnya kesempatan perempuan untuk berkiprah di bidang politik dan kebijakan sehingga program yang berperspektif perempuan dalam politik dan kebijakan pun menjadi berkurang.

Adanya stereotipe tentang kemampuan perempuan dalam bidang politik sejalan dengan temuan Brenner (1995) dikutip Dewi (2017) yang menyatakan bahwa laki-laki dianggap memiliki kemampuan dan potensi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang mengakibatkan perempuan dikesampingkan dari aktivitas politik.

3. Kasus Kekerasan pada Perempuan Di Desa Selaras

Beberapa kasus kekerasan pada perempuan yang pernah terjadi di desa yang menjadi lokasi penelitian antara lain: kasus poligami, aniaya (kekerasan fisik), eksploitasi dan penelantaran ekonomi, dan kekerasan seksual.

a. Poligami

Cici adalah seorang ibu rumah tangga. Suaminya, Ujang, bekerja sebagai supir antar kota. Sepuluh tahun setelah menikah dengan Cici, Ujang menikah siri secara diam-diam dengan perempuan yang sering ia temui di wilayah kerjanya. Cici mendapatkan informasi tentang pernikahan siri suaminya dari teman suaminya yang bekerja di daerah yang sama. Ujang tetap melanjutkan pernikahan sirinya walaupun Cici tidak setuju. Hal ini sering menyebabkan pertikaian di antara Cici dan Ujang. Ujang kerap melakukan kekerasan verbal kepada Cici dan membuat Cici merasa sakit hati.

Cici sempat berpikir untuk bercerai dari Ujang karena ia merasa menderita. Namun, Cici juga merasa berat apabila bercerai dari suaminya. Sebab, ia membutuhkan Ujang untuk membiayai anak-anak mereka. Cici ingin anak-anaknya terus melanjutkan pendidikan. Akhirnya ia lebih memilih untuk menahan sakit hati yang ia rasakan dan tetap mempertahankan rumah tangganya.

Penelitian sebelumnya menemukan adanya keterkaitan erat antara pekerjaan sebagai supir, praktik seks di luar nikah dan bahkan poligami. Pekerjaan sebagai supir sering menjadi alasan laki-laki melakukan poligami karena pekerjaan sebagai supir mengharuskan laki-laki bepergian jauh dan lama, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya di rumah. Alasan ini seolah menunjukkan adanya permakluman laki-laki pada praktik seksual mereka. Anggapan bahwa hasrat seksual laki-laki merupakan sifat bawaan yang tidak dapat mereka kendalikan (Van Bemmelen, 2009) menjadi dasar pembenaran bagi praktik seksual di kalangan para supir.

b. Kekerasan Fisik

Rosyidah adalah seorang ibu rumah tangga yang kadang-kadang menyambi bekerja sebagai buruh tani. Suaminya, Herman adalah tokoh masyarakat yang bekerja sebagai buruh serabutan. Di awal pernikahannya, Rosyidah sempat mengalami penelantaran ekonomi oleh Herman. Pada saat itu, penghasilan Herman dari bekerja serabutan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini membuat Rosyidah harus turut mencari uang dengan bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil dan kadang-kadang ditambah mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak jarang, Rosyidah harus menahan lapar atau berpuasa apabila persediaan makanan di rumah mereka habis. Rosyidah jarang mengeluh tentang perilaku suaminya yang tampak tidak peduli dengan kesulitan finansial di

² *Heureut lengkah* adalah istilah dalam Bahasa Sunda yang berarti memiliki keterbatasan dalam beraktivitas.

rumah tangga mereka. Ia juga tidak pernah meminta suaminya untuk bekerja lebih keras agar mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Ia hanya berharap dan meyakini bahwa suaminya akan berubah dan menjadi lebih rajin bekerja.

Namun, ternyata Herman tidak mengubah perilakunya. Justru, ia mulai melakukan kekerasan seperti memukul dan menendang Rosyidah saat pernikahan mereka menginjak tahun ketiga. Hal ini terjadi karena mereka mulai sering berselisih paham karena Rosyidah sudah mulai berani mengungkapkan kekesalannya kepada Herman. Herman sering memukul Rosyidah pada wajah dan kakinya. Bahkan pukulan Herman pernah mengakibatkan pipi dan rahang Rosyidah mengalami bengkak yang cukup parah; dan mengakibatkan kakinya lebam.

Rosyidah tidak pernah bercerita kepada siapa pun bahwa ia menjadi korban kekerasan suaminya, sehingga orang lain menganggap rumah tangganya tidak bermasalah. Apabila orang lain melihat luka pada tubuh Rosyidah, ia seringkali membuat alasan untuk menutupi tindakan suaminya. Ia melakukan hal ini karena ia tidak ingin mempermalukan keluarganya (*embung ngawiwirang keluarga*).

Alasan lain yang menyebabkan Rosyidah mempertahankan rumah tangganya adalah karena ia tidak ingin anak-anaknya menjadi korban perceraian, terutama anak bungsunya yang sangat manja kepada Herman. Rosyidah hanya berharap suatu hari Herman akan sadar dan berperilaku lebih baik sebagai balasan atas kesabarannya.

Kasus kekerasan fisik yang dialami Rosyidah disebabkan oleh kondisi psikis Herman yang cenderung emosi, dan ditambah komunikasi yang kurang baik di antara mereka berdua yang seringkali menyebabkan mereka bertengkar. Kekerasan fisik yang dialami oleh Rosyidah dilanggengkan dengan tindakan Rosyidah yang membiarkan tindakan kekerasan yang ia terima dengan harapan suaminya akan berubah. Rosyidah menganggap tindakannya dapat menyelamatkan rumah tangganya agar anaknya tidak menjadi korban perceraian, serta menjaga nama baik keluarganya di mata masyarakat. Selain itu, di lingkungan tempat tinggal Rosyidah terdapat kebiasaan yaitu perempuan enggan menceritakan kekerasan yang dialaminya di dalam rumah tangga karena hal itu dianggap sebagai aib yang dapat mempermalukan keluarga (*ngawiwirang keluarga*).

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib adalah salah satu faktor sulitnya intervensi pihak luar (misal lembaga pendamping kasus) terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh penyintas. Hal ini karena penyintas yang menganggap bahwa kekerasan yang dialaminya adalah aib tidak mampu melaporkan kekerasan yang dialaminya dan meminta bantuan dari pihak luar (Harefa, 2021; Nofitasari & Supianto, 2019; Tamrin et al., 2020).

c. *Eksplotasi dan Kekerasan ekonomi*

Indah mengalami penelantaran dan eksploitasi ekonomi sejak ia menikah dengan Dodi pada 2001. Dodi memiliki sifat malas bekerja dan menggantungkan perekonomian keluarga pada Indah. Ia selalu meminta bantuan kepada Indah ketika melakukan pekerjaannya, misal meminta Indah untuk mencarikan modal. Hal ini menyebabkan Indah kerap meminjam uang kepada rentenir dan melakukan berbagai pekerjaan seperti menjadi buruh tani dan buruh pabrik untuk melunasi pinjaman itu.

Indah tidak pernah mengeluhkan sikap Dodi yang malas bekerja. Ia membiarkan sikap Dodi dengan harapan bahwa suaminya akan sadar dan berubah seiring berkembangnya rumah tangga mereka. Namun, ternyata sikap Dodi tetap tidak berubah hingga usia pernikahan mereka mencapai dua tahun.

Pada tahun 2006, Indah berinisiatif untuk bekerja di Arab Saudi dengan tujuan memperbaiki perekonomian keluarganya. Selama bekerja, ia rutin mengirimkan uang kepada suaminya per empat bulan sekali untuk biaya kebutuhan anaknya. Namun, uang tersebut ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dodi justru menggunakan uang yang diterima Indah untuk memenuhi kepuasan pribadinya; walaupun demikian, Indah tidak dapat berbuat apa-apa dan tetap bersabar. Indah lebih memilih untuk kembali rajin bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup ia dan anaknya.

Kekerasan ekonomi yang dialami Indah disebabkan oleh ketidaktahuannya bahwa hal yang ia alami merupakan sebuah kekerasan ekonomi. Indah bekerja keras dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa menyadari bahwa ia telah dieksploitasi secara ekonomi oleh suaminya. Namun, Indah tetap diam walaupun ia mengetahui bahwa uang yang telah dihasilkannya digunakan oleh suaminya untuk keperluannya sendiri.

Kasus yang dialami Indah merupakan kelindan persoalan yang melibatkan faktor ekonomi, faktor ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya, faktor ketidaktahuan mengenai kekerasan, dan faktor rendahnya etos kerja laki-laki. Etos kerja Dodi yang rendah menimbulkan masalah keuangan dalam rumah tangga. Hal ini makin parah ketika pada saat yang sama, Indah, sebagai seorang istri memiliki akses terhadap pinjaman dana dan akses terhadap lapangan kerja yang memiliki penghasilan yang lebih besar terhadap suaminya, akan tetapi, kontrol untuk mengelola dana hasil pinjaman dan hasil kerja Indah tetap dimiliki oleh suaminya. Kasus yang dialami Indah ini merupakan praktik dari konsep *master* dan *manager*; di mana perempuan memiliki tanggung jawab dan kontribusi terhadap ekonomi keluarga; akan tetapi, kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan tidak dapat melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki (Sullivan, 1994 dikutip Dewi, 2017).

d. Kekerasan Seksual

Putri adalah salah satu korban kekerasan seksual. Ia mulai mengalami pelecehan seksual (istilah lokal: *dinodaan*)³ sejak 2010 ketika ia berusia 11 tahun. Pada saat itu, ibu kandungnya (Susi) menikah lagi dengan Amir dan tinggal bersama di rumah kontrakan kecil bersama Putri dan adik lakinya. Susi bekerja sebagai asisten rumah tangga yang bekerja dari pagi hingga sore hari; sedangkan Amir bekerja sebagai supir truk jarak jauh.

Kekerasan seksual yang dialami Putri berawal karena kondisi rumah yang sempit sehingga Putri dan anggota keluarga termasuk ayah tirinya harus berdesak-desakan di kontrakan mereka. Pada kondisi itu, Amir memeluk, mencium, dan meraba beberapa bagian tubuh Putri. Putri merasa kaget dan takut atas tindakan yang dilakukan oleh Amir sehingga ia menceritakan pelecehan yang ia alami kepada ibunya. Namun, ibunya justru menyalahkan Putri dan menganggap Putri menyalahartikan kasih sayang yang diberikan oleh ayah tirinya. Hal ini menyebabkan Amir semakin leluasa melakukan pelecehan kepada Putri; dan Putri tidak lagi bercerita tentang hal itu.

Pada tahun 2011, kondisi ekonomi keluarga Putri semakin memburuk, sehingga Amir menyarankan Susi untuk bekerja sebagai buruh migran di Arab Saudi. Kondisi ini mendorong Amir melakukan lebih leluasa melakukan kekerasan seksual pada Putri. Amir mulai memperkosa Putri hingga hamil.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Putri disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi, pengetahuan, dan stereotipe gender. Faktor ekonomi yang mendorong terjadinya kekerasan seksual pada Putri adalah rendahnya penghasilan keluarga sehingga tidak mampu memiliki tempat tinggal yang lebih luas dan lebih aman untuk menghindari kekerasan seksual. Faktor pengetahuan yang menyebabkan tindakan kekerasan seksual kepada Putri adalah kurangnya pengetahuan Susi, sebagai ibu dari Putri mengenai kekerasan seksual sehingga ia tidak dapat mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada Putri. Budaya yang mengagungkan kebutuhan seksualitas laki-laki juga berperan dalam menyebabkan kekerasan seksual yang dialami Putri.

4. Penyebab Kekerasan pada Perempuan

Penelitian ini menemukan, bahwa terdapat tujuh faktor yang berkaitan dengan kasus kekerasan pada perempuan di Desa Selaras, Jawa Barat. Berdasarkan uraian sebelumnya tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi, beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan pada perempuan di Desa Selaras yaitu:

a. Ketimpangan gender

Ketimpangan gender adalah salah satu faktor penyebab kekerasan yang paling dominan. Meskipun nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat Sunda menjunjung kesetaraan (Mugniesyah dan Kosuke,

2007; Rohmana, 2014; Muttaqien, 2020), tetapi di Desa Selaras, praktik ketimpangan gender banyak ditemui. Bentuk ketimpangan gender tersebut adalah:

Pertama, peran reproduksi yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Di Desa Selaras, umumnya pengasuhan anak dibebankan kepada perempuan apabila sepasang suami-istri bercerai. Kondisi ini menyulitkan perempuan terutama bagi mereka yang bergantung secara ekonomi kepada suami mereka.

Kedua, ketimpangan akses dan kontrol sumber daya menyebabkan perempuan mudah dieksploitasi secara ekonomi. Perempuan memiliki akses terhadap sumber daya modal yang dapat membantu perekonomian keluarga, akan tetapi kontrol terhadap sumber daya tersebut dimiliki oleh laki-laki; sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan.

Ketiga, stereotipe gender yang menjadi dasar pemakluman tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Hal ini terjadi pada poligami yang dialami oleh Cici, dan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri. Pelaku jenis kekerasan tersebut memiliki profesi sebagai supir truk jarak jauh yang dianggap biasa untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada orang lain yang bukan merupakan pasangan sah mereka.

Keempat, subordinasi perempuan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi pada kasus kekerasan fisik yang dialami oleh Rosyidah. Ia menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya sebagai bentuk kontrol dan ekspresi kekuasaan yang dialami oleh suaminya.

b. Ekonomi keluarga

Rendahnya taraf ekonomi keluarga yang berujung pada terbatasnya sumber finansial menjadi faktor yang cukup dominan pada kasus kekerasan. Faktor ini berperan dalam terjadinya kasus poligami, penelantaran dan eksploitasi ekonomi, dan kekerasan seksual. Pada kasus poligami yang dialami oleh Cici, keterbatasan ekonomi yang dialaminya menyebabkan ia bergantung pada suaminya sehingga ia tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun ia menjadi korban kekerasan. Pada kasus kekerasan ekonomi yang dialami oleh Indah, ketidakmampuan suami Indah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup membuat Indah harus bekerja keras untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Putri, rendahnya ekonomi keluarga Putri menyebabkan mereka tidak mampu memiliki tempat tinggal yang lebih luas dan mampu menghindarkan Putri dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. Selain itu, rendahnya taraf ekonomi mereka menyebabkan ibu kandung Putri bekerja di luar negeri dan meninggalkan Putri bersama ayah tirinya.

c. Pengetahuan mengenai kekerasan

Rendahnya pengetahuan para perempuan mengenai definisi kekerasan terhadap perempuan terjadi karena tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan

³ "Dinodaan" dalam bahasa Indonesia berarti dinodai.

rendahnya kesadaran yang mereka miliki terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan terlihat pada kasus kekerasan ekonomi yang dialami oleh Indah dan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Putri. Pada kasus Indah, ia tidak memiliki kesadaran bahwa ia menjadi korban kekerasan ekonomi sehingga ia mengalami eksploitasi ekonomi oleh suaminya selama delapan tahun. Pada kasus Putri, ibu Putri tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh suami barunya kepada Putri adalah tindakan kekerasan seksual; sehingga ia tidak memberikan perlindungan yang mampu mencegah kekerasan seksual kepada Putri terus terjadi.

d. Sikap pasif terhadap tindakan kekerasan

Faktor lain yang menjadi penyebab langgengnya kekerasan pada perempuan berdasarkan temuan dalam penelitian ini adalah sikap istri yang membiarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami mereka. Hal ini terlihat pada kasus kekerasan fisik dan kasus penelantaran dan eksploitasi ekonomi. Rosyidah dan Indah tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan kekerasan yang mereka alami karena menganggap bahwa suami mereka akan berubah dan tidak melakukan tindakan kekerasan lagi.

e. Kepribadian laki-laki

Kepribadian laki-laki yang cenderung melakukan kekerasan terlihat pada kasus kekerasan fisik yang dialami oleh Rosyidah dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Indah. Pada kasus yang dialami Rosyidah, kepribadian suami Rosyidah yang mendorong tindak kekerasan adalah kondisi psikisnya yang mudah emosi dan ringan tangan. Pada kasus yang dialami oleh Indah, kepribadian suami Indah yang mendorong tindak kekerasan adalah sifat malas bekerja dan rendahnya etos kerja.

f. Komunikasi di dalam keluarga

Kurang baiknya komunikasi di dalam keluarga terjadi pada kasus kekerasan fisik yang dialami oleh Rosyidah. Kurang baiknya komunikasi yang dimiliki oleh Rosyidah dan suaminya menyebabkan mereka sering terlibat dalam perselisihan yang berujung pada kekerasan fisik yang dialami oleh Rosyidah.

g. Faktor budaya 'wirang' dan 'embung pipilueun'

Faktor budaya yang berperan dalam kasus kekerasan dalam penelitian ini terjadi pada kekerasan fisik yang dialami Rosyidah. Penyintas cenderung menutupi kasus kekerasan yang dialaminya agar tidak mempermalukan keluarga (*ngawiwirang keluarga*), karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib yang sebaiknya tidak diceritakan pada orang lain. Mereka cenderung hanya bercerita kepada anggota keluarga atau tetangga yang dianggap benar-benar dapat menyimpan rahasia. Hal ini menyebabkan penyintas tidak dapat bercerita kepada orang lain dan meminta pertolongan atas

kekerasan yang dialaminya. Kasus serupa juga terjadi pada masyarakat Desa Taekas di Nusa Tenggara Timur. Anggapan masyarakat bahwa menceritakan permasalahan keluarga kepada orang lain adalah hal yang tabu menyebabkan perempuan tidak dapat mencari pertolongan untuk mengatasi kekerasan yang mereka alami (Tayana, 2021).

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pendamping kasus, masyarakat di desa itu cenderung apatis dan tidak berani ikut campur apabila menyaksikan kekerasan pada perempuan terjadi di sekitar mereka. Hal ini disampaikan oleh salah satu warga sebagai berikut:

"Mun aya nu pasea, sanes alim misahkeun. Tapi sieun kumaha kitu engke malikna. Kan sok aya nu kieu, 'ah rumah tangga urang, naon bet pipilueun?' Matak keun we sok diantep."

(Kalau ada yang berkelahi, bukan tidak mau memisahkan. Tapi takut nanti bagaimana respon orang yang bersangkutan. Kan ada yang suka bilang, 'ah rumah tangga saya, kenapa kamu ikut campur?' Makanya suka dibiarkan saja.) – Aida, 16 November 2019.

Masyarakat cenderung membiarkan dan hanya menyaksikan kasus kekerasan yang terjadi di sekitar mereka karena merasa takut dan tidak ingin ikut campur terhadap masalah orang lain (*embung pipilueun*), sehingga mereka lebih memilih diam ketika mengetahui kekerasan yang dialami oleh orang di sekitar mereka. Kondisi seperti ini menyebabkan perempuan yang menjadi penyintas kekerasan sulit mendapatkan pertolongan agar mereka dapat keluar dari permasalahan kekerasan yang mereka alami.

D. KESIMPULAN

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Desa Selaras menunjukkan bahwa bentuk kekerasan masih terjadi bahkan pada masyarakat yang dikenal menjunjung keadilan gender dan keharmonisan. Nyatanya, di balik keharmonisan yang tampak di luar, banyak kekerasan yang disembunyikan rapat-rapat oleh penyintas kekerasan karena tidak ingin malu (*wirang*) akibat permasalahan rumah tangga mereka, atau masih ada masyarakat yang tidak berani membantu penyintas kekerasan karena rasa takut (*sieun*) dan tidak ingin ikut terlibat dalam permasalahan orang lain (*embung pipilueun*).

Ketimpangan gender dalam berbagai bentuk misal tanggung jawab mengasuh anak bagi perempuan yang bercerai dan pengagungan seksualitas laki-laki masih menjadi faktor yang dominan dalam terjadinya kasus kekerasan pada perempuan; tetapi faktor tersebut bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan pada perempuan di desa itu. Kekerasan pada perempuan juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti rendahnya perekonomian keluarga,

rendahnya pengetahuan mengenai kekerasan, sikap penyintas yang pasif terhadap kekerasan yang ia alami, dan faktor budaya, yaitu anggapan bahwa kekerasan adalah aib keluarga; dan masyarakat yang tidak ingin ikut campur pada kekerasan yang dialami oleh orang lain.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada para penyintas dan pendamping kasus kekerasan di Desa Selaras yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dafeni, S. R., Mawarni, A., Nugroho, D., & Dharmawan, Y. (2017). Hubungan Beberapa Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Istri PUS di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(4), 256–264. <https://doi.org/10.14710/jkm.v5i4.18357>
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21.
- Herawati, E. (2019). Budaya, Agama, dan Makna Volunterisme bagi Kader Warga Peduli AIDS di Kota Bandung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(2), 132-141. <https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n2.p132-141.2019>
- Iskandar, Y., & Hamid, A. (2019). Tinjauan Spasial Upah Menurut Jenis Kelamin dan Kaitannya dengan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v1i2.6>
- Jalil, I. A., & Tanjung, Y. (2020). Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan*, 1(1), 58–70. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjisp.v1i1.4376>
- Kim, G., & Yang, S. (2016). An Ethnographic Study of a Shelter for Victims of Domestic Violence in Korea. *Indian Journal of Gender Studies*, 23(3), 376–392. <https://doi.org/10.1177/0971521516656076>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*. Dikutip dari: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>
- Korlefura, C., & Tupamahu, M. K. (2021). Kaum Perempuan dalam Fungsi Produksi: Studi pada Pedagang Wanita di Pasar Tradisional. *Intelektiva Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(4), 74–80.
- Kottak, C. P. (2000). *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*. Mc.Graw-Hill.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. SAGE Publications Inc.
- Mugniesyah, S. S., & Kosuke, M. (2007). Access to Land in Sundanese Community. *Japanese Journal of Southeast Asian Studies*, 44(4), 519–544.
- Muttaqien, Z. (2020). Peran Perempuan dalam Tradisi Sunda Wiwitan. *Khazanah Theologia*, 1(1), 23–29. <https://doi.org/10.15575/kt.v1i1.7123>
- Nofitasari, S., & Supianto, S. (2019). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Ekonomi Lemah dalam upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 8(1), 53–66. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.487>
- Obie, M. (2018). Violence against women in Muna, Southeast Sulawesi, Indonesia (A perspective of gender sociology). *The Social Science*, 13(1), 154–159. <https://dx.doi.org/10.36478/sscience.2018.154.159>
- Purba, L. (2011). *Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang*. Dikutip dari: <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/7970a-5a3f9-8.-kekerasan-terhadap-perempuan.pdf>
- Purnaningsiwi, F. A., Sundarso, S., & Rengga, A. (2014). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

- SERUNI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 192–200. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v3i3.5745>
- Puspitawati, H. (2013). Konsep dan Teori Keluarga. *Gender Dan Keluarga*. Dikutip dari: <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000074580.79648.9d>
- Rohmana, J. A. (2014). Perempuan dan Kearifan Lokal: Performativitas Perempuan dalam Ritual Adat Sunda. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(2), 151–165. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.151-166>
- Rosala, D., Masunah, J., Narawati, T., Karyono, T., & Sunaryo, A. (2021). Internalisasi Nilai Tri-Silas melalui Pembelajaran Tari Anak Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1973–1986. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.1087>
- Rostiyati, A. (2018). Peran Ganda Perempuan Nelayan di Desa Muara Gading Mas Lampung Timur. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 10(2), 187-202. <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v10i2.373>
- Sita, K., & Herawati, E. (2017). Gender Relation in Tea Plucking Workers: A Case Study of Gender Division of Labour and Gender Relation in Gambung Tea Plantation, West Java. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.16266>
- Sujadmi, S. (2017). Perempuan dalam Arena Kekerasan Domestik: (Studi Dokumen Penyebab Kekerasan pada Perempuan dalam Rumah Tangga di Pulau Bangka). *Society*, 5(1), 99–106. <https://doi.org/10.33019/society.v5i1.23>
- Tamrin, T., Manullang, S. O., Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2020). Peran Lembaga Konsultasi dalam Merubah Sikap dan Persepsi Istri Korban Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Sambas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Intizar*, 26(2), 73–80. <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7471>
- Tanaya, S. Shackled by Patriarchy and Poverty: Women's Experiences with Domestic Violence in North Central Timor and North Sumatra. *PCD Journal*, 8(2), 187-202. <https://doi.org/10.22146/pcd.v8i2.877>
- van Bemmelen, S. T. (2009). *Menuju Masyarakat Adil Gender*. Veco Indonesia.
- Vibriyanti, D. (2015). Peran Kaum Perempuan dalam Industri Kerajinan Gerabah Di Desa Banyumulek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 17(2), 117–129. <https://doi.org/10.25077/jantro.v17.n2.p117-129.2015>
- You, Y. (2019). Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65-77. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>
- Zulaikha, F. I., & Purwaningsih, S. (2019). Representasi Identitas Perempuan dalam Ranah Domestik - Sebuah Kajian Semiotika Budaya pada Peribahasa Sunda. *NUSA*, 14(3), 341–352. <https://doi.org/10.14710/nusa.14.3.341-352>